

## UPAYA PENINGKATAN KINERJA DPRD KABUPATEN SOPPENG

### ***EFFORTS TO IMPROVE PERFORMANCE OF THE SOPPENG DISTRICT DPRD***

**Zaldi Rusnaedy<sup>1</sup>, Aswar Annas<sup>2</sup>, Anirwan<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Pancasakti, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Teknologi dan Pariwisata Amanaggapa Makassar, Indonesia E-mail:  
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine efforts to improve the performance of the Soppeng District Parliament. The research method used is a descriptive quantitative research method that is exploratory in explaining the performance of DPRD members. The results showed that efforts to improve performance were carried out by increasing the intensity of visits and support for recess budgeting to capture people's aspirations; optimization of the DPRD budgeting function in channeling the thoughts of members of the DPRD in the interests of improving the welfare of the community; development of orientation methods and technical guidance of DPRD members for the effectiveness of increasing regulatory knowledge and mastery of planning, budgeting and supervision; increased oversight of DPRD members through discussion of planning and budgeting (budgeting) in the design of government programs/activities based on expected inputs (funding) and outcomes (expected results); optimizing the duties of Honorary Board members in reviewing and evaluating the behavior of DPRD members; increasing the availability of supporting facilities for the knowledge and performance of DPRD members; improvement of socialization and publication related to the duties, functions and performance of DPRD members; development of methods to capture the aspirations of DPRD members in supporting the birth of the initiative of the perda.*

**Keywords: Strategy; Performance Improvement; Legislative.**

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat eksploratif dalam menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjangkaran aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan

perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan *outcome* yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjangkaran aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif.

**Kata Kunci: Strategi; Peningkatan Kinerja; Legislatif.**

## PENDAHULUAN

Kinerja anggota DPRD yang baik merupakan keharusan dan kebutuhan agar lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya secara *akuntabel*, responsif dan *reliable* (Rizal & Akbal, 2017 dan Nurhikmah, 2018). Keberhasilan lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh kinerja anggotanya atau hasil kerja yang dicapai oleh anggota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Anggota DPRD menjadi faktor determinan keberhasilan kinerja lembaga legislatif. Anggota DPRD dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, disiplin diri dan semangat kerja. Sehingga anggota legislatif dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan lembaga tersebut (Sundoko et al, 2016 dan Zakaria, 2019).

Sebagai unsur pemerintah daerah di bidang legislatif, DPRD memiliki hak dan kewajiban. Diantaranya, hak menyatakan pendapat, hak meminta keterangan, hak melakukan penyelidikan. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi utama yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran (Budiardjo, 2008; Fahmi, 2016; Suwanda, 2016). Dalam menjalankan hak dan wewenang yang dimiliki DPRD, sejauh ini dinilai belum maksimal, dikarenakan beberapa hal. Namun kendala yang paling mendasar adalah masalah SDM anggota DPRD. Anggota DPRD pada umumnya hanya dibekali pengetahuan singkat mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajibannya pada saat orientasi awal pelantikan. Hal ini kemudian memunculkan kendala bahwa masing-masing individu dari anggota DPRD umumnya belum mendapatkan kesiapan keilmuan terkait legislasi yang merata terhadap semua anggota DPRD (Rajab, 2016).

Kendala tersebut merata terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Soppeng yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Berdasarkan observasi awal, kinerja DPRD Kabupaten Soppeng belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal: lemahnya kemampuan anggota DPRD pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda; masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif; kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda rapat-rapat DPRD; belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, sehingga dapat meramu strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Sehingga *outcome* yang diharapkan dari penelitian ini fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Kabupaten Soppeng dapat ditingkatkan yang bermuara pada pencapaian tujuan amanah rakyat.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu (Sugiyono, 2014 dan Yusuf, 2016). Pengumpulan data utama (data primer) yang digunakan menggunakan teknik observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner. Sedangkan data penunjang (sekunder) dengan menggunakan teknik dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program yang tersedia di DPRD Kabupaten Soppeng dan hasil laporan kajian sebelumnya yang terkait dengan

masalah yang dikaji. Responden terdiri dari keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Soppeng sejumlah 30 orang.

## HASIL DAN DISKUSI

Analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan berbagai macam tindakan alternatif yang mungkin terbaik bagi suatu daerah dalam usaha mewujudkan misi dan sasaran aplikasi untuk menentukan strategi utama. Berdasarkan konsep Rangkuti, dilakukan melalui pemakaian beberapa matriks dengan dua tahap pelaksanaan, yaitu: 1) Tahap masukan (*the input storage*), yakni Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan Matriks *Eksternal Factor Evaluation* (EFE). 2) Tahap pencocokan (*the matching stage*), yakni matriks SWOT (Rangkuti, 2005).

Penyusunan strategi ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan, pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Dalam evaluasi faktor strategis yang digunakan adalah model matriks faktor strategis eksternal dan matriks faktor strategis internal. Setelah penetapan kekuatan dan kelemahan antara faktor internal dengan faktor eksternal, maka disusunlah hasil analisis melalui suatu prosedur *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Matrix IFE dan EFE digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam kinerja DPRD di Kabupaten Soppeng.

Faktor Evaluasi Internal (IFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dan Faktor Evaluasi Eksternal (EFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi peluang dan ancaman/hambatan utama terhadap permasalahan dalam peningkatan kinerja DPRD di Kabupaten Soppeng. Matriks IFE juga menyediakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan di antara fungsional permasalahan tersebut yang selanjutnya digunakan dalam

perumusan strategi. Matriks IFE dan matrix EFE dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi faktor kunci internal dan eksternal, tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian.

Penyusunan strategi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng digunakan analisis SWOT. Penyusunan strategi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai *scoring* tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan eksternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan (*matching tool*).

### **Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng**

Pada tahap ini, data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal DPRD Kabupaten Soppeng. Setelah penetapan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/hambatan terhadap faktor internal dan faktor eksternal, maka disusunlah hasil analisis melalui suatu prosedur *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) yang kemudian Matrix IFE dan EFE digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng.

Adapun *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *Eksternal Factor Evaluation* (EFE) yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

#### **1. *Internal Factor Evaluation* (IFE) pada DPRD Kabupaten Soppeng**

Faktor Evaluasi Internal (IFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan utama terhadap permasalahan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Pada Faktor Evaluasi Internal (IFE) terdapat dua matriks yakni matriks kekuatan dan matriks kelemahan. Matriks tersebut merupakan hasil pengklasifikasian dan pra-analisis kekuatan dan kelemahan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor kunci pada faktor kekuatan dan kelemahan diberikan penilaian skala rating dan nilai bobot yang kemudian dilakukan kalkulasi bobot dan skala

untuk mendapatkan nilai scoring di setiap faktor-faktor kunci. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Matriks IFE (Kekuatan) DPRD Kabupaten Soppeng**

No	Faktor-Faktor Kekuatan	Total		Skor Rating x Bobot
		Rating	Bobot	
1	Secara kelembagaan DPRD memiliki hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat melalui RDP yang dapat digunakan anggota DPRD	3,00	0,06	0,175
2	Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda inisiatif yang berpihak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat	3,33	0,06	0,210
3	Setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan usulan dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses penjangkaran aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat	3,33	0,06	0,212
4	Setiap anggota DPRD memiliki hak mengajukan pertanyaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD	3,17	0,06	0,201
5	Setiap anggota DPRD memiliki hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD	3,42	0,06	0,215
6	Setiap anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi (Baik hak penganggaran untuk fasilitas penunjang kinerja anggota DPRD maupun hak kepemilikan dokumen-dokumen dalam menunjang kinerja anggota DPRD)	3,25	0,06	0,204
7	Memiliki responsivitas yang baik untuk membahas usulan Ranperda dari pemerintah	3,25	0,06	0,200
8	DPRD memiliki komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan SKPD, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat	3,33	0,06	0,205
9	Hubungan dan komunikasi yang baik antar Anggota Dewan	0,25	0,01	0,001
10	Peran tenaga ahli DPRD dalam memberikan masukan, pertimbangan untuk pembahasan Ranperda dan pokok-pokok permasalahan lainnya	0,33	0,01	0,002
11	Kepedulian/kepekaan anggota DPRD terhadap kepentingan masyarakat	0,25	0,01	0,001
<b>Jumlah S</b>			<b>0,51</b>	<b>1,63</b>

Sumber: diolah penulis, 2019.

**Tabel 2.**  
**Matriks IFE (Kelemahan) DPRD Kabupaten Soppeng**

No	Faktor-Faktor Kelemahan	Total		Skore Rating x Bobot
		Rating	Bobot	
1	Lemahnya kemampuan anggota DPRD pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda	3,25	0,06	0,198
2	Masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD	3,17	0,06	0,189
3	Kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda rapat-rapat DPRD	3,25	0,06	0,194

4	Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah dan potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal sehingga berdampak pada sikap kritis anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Ranperda		0,06	
5	Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja	3,00	0,05	0,159
6	Masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif	3,25	0,06	0,156
7	Masih terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan eksekutif	2,83	0,05	0,196
8	Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas	3,33	0,06	0,150
9	Lemahnya atau tidak adanya sanksi disiplin bagi anggota di dalam tatib disiplin	0,25	0,01	0,192
10	Kurang seringnya menyerap langsung aspirasi masyarakat	0,25	0,00	0,001
11	Kurang Memahami Kemauan Masyarakat, LSM dan Pers	0,25	0,01	0,001
12	Relasi yang kurang baik DPRD terhadap LSM dan Pers	0,25	0,01	0,002
13	Belum adanya kebijakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat	0,25	0,01	0,001
	Jumlah W	0,49	1,43	0,001
Total (S)			1	

Sumber: diolah penulis, 2019.

## 2. *Eksternal Factor Evaluation (IFE)* pada DPRD Kabupaten Soppeng

Faktor Evaluasi Eksternal (EFE) matriks adalah alat manajemen strategis untuk audit atau mengevaluasi faktor-faktor peluang dan ancaman/hambatan utama terhadap permasalahan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Pada Faktor Evaluasi Eksternal (EFE) juga terdapat dua matriks yakni matriks peluang dan matriks ancaman/hambatan. Matriks tersebut merupakan hasil pengklasifikasian dan pra-analisis peluang dan ancaman/hambatan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor kunci pada faktor peluang dan ancaman/hambatan diberikan penilaian skala rating dan nilai bobot yang kemudian dilakukan kalkulasi bobot dan skala untuk mendapatkan nilai *scoring* di setiap faktor-faktor kunci. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 7 dan 8 berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Matriks EFE (Peluang) DPRD Kabupaten Soppeng**

No	Faktor-Faktor Peluang	Total		Skore Rating x Bobot
		Rating	Bobot	
1	Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hak DPRD, Hak dan kewajiban anggota DPRD	3,17	0,08	0,252
2	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dan kritik konstruktif untuk peningkatan kinerja	3,17	0,08	0,249

	anggota DPRD			
3	Tersedianya layanan bimtek, pelatihan, dan workshop untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD	3,00	0,07	0,220
4	Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah	3,42	0,08	0,271
5	Adanya kelembagaan sekretariat DPRD yang bertugas untuk mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD	3,42	0,08	0,268
6	Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai di sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya	3,33	0,08	0,271
Jumlah O			0,47	1,53

Sumber: diolah penulis, 2019.

**Tabel 4.**

**Matriks EFE (Ancaman/Hambatan) DPRD Kabupaten Soppeng**

No	Faktor-Faktor Ancaman/Hambatan	Total		Skore Rating x Bobot
		Rating	Bobot	
1	Adanya kompleksitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	3,08	0,08	0,237
2	Rendahnya pemahaman masyarakat atas batasan kewenangan anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat (DPRD tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran)	3,17	0,08	0,246
3	Adanya kekuatan partai politik yang dapat mengarahkan arah perjuangan anggota DPRDnya meskipun tidak sesuai sikap dan nurani anggota DPRD akan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat	2,83	0,07	0,196
4	Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat	3,17	0,07	0,216
5	Belum tersedianya buku regulasi dari sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPRD (Contoh: Buku saku UU, PP, Perpres, Permendagri)	3,33	0,08	0,271
6	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan sekretariat DPRD penunjang pelaksanaan tugas terutama pada pelaksanaan rapat-rapat anggota DPRD	2,92	0,08	0,222
7	Ketersediaan akses jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih belum memadai	3,08	0,08	0,248
Jumlah T			0,53	1,63
Total (O+T)			1	

Sumber: diolah penulis, 2019.

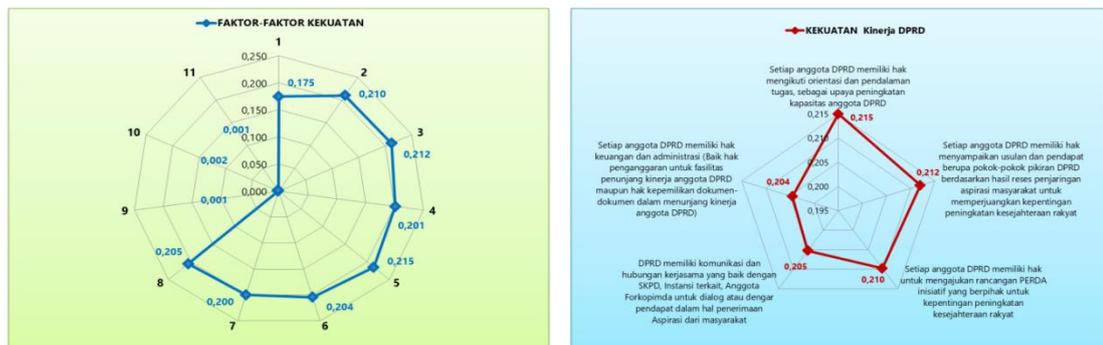
**Nilai *Scoring* Tertinggi pada Faktor Kunci Internal dan Eksternal DPRD Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan matriks IFE dan EFE yang menyediakan hasil pengidentifikasian dan evaluasi hubungan antara permasalahan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Soppeng yang selanjutnya akan digunakan dalam perumusan

strategi dalam matriks SWOT. Berikut grafik-grafik nilai *scoring* masing-masing pada faktor kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancaman/hambatan.

**Grafik 1.**

**Nilai Scoring Tertinggi Berdasarkan Faktor Kekuatan Dimiliki DPRD**

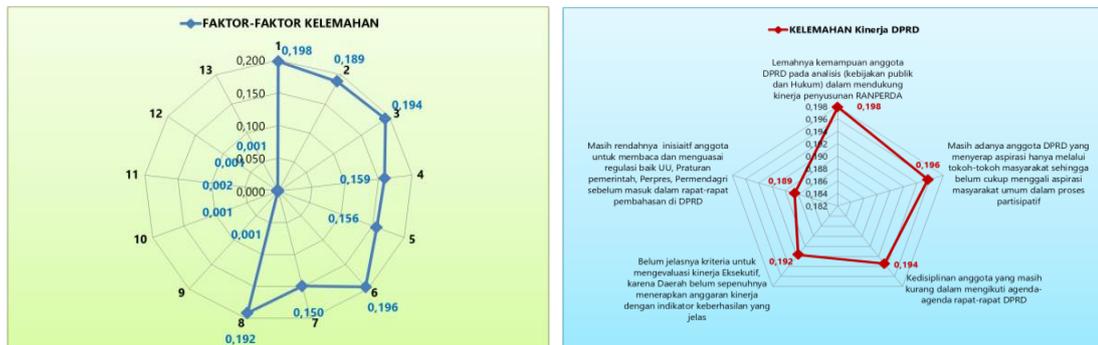


Sumber: diolah penulis, 2019

Berdasarkan pada Grafik 1, nilai *scoring* pada faktor kekuatan, kemudian terpilih 5 nilai *scoring* tertinggi yang kemudian digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Setiap anggota DPRD memiliki hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD; 2) Setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan usulan dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses penjangkaran aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; 3) Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda inisiatif yang berpihak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat; 4) DPRD memiliki komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan SKPD, instansi terkait, anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan aspirasi dari masyarakat; dan 5) Setiap anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi (baik hak penganggaran untuk fasilitas penunjang kinerja anggota DPRD maupun hak kepemilikan dokumen-dokumen dalam menunjang kinerja anggota DPRD).

Grafik 2.

**Nilai *Scoring* Berdasarkan Faktor-Faktor Kelemahan Dimiliki DPRD**

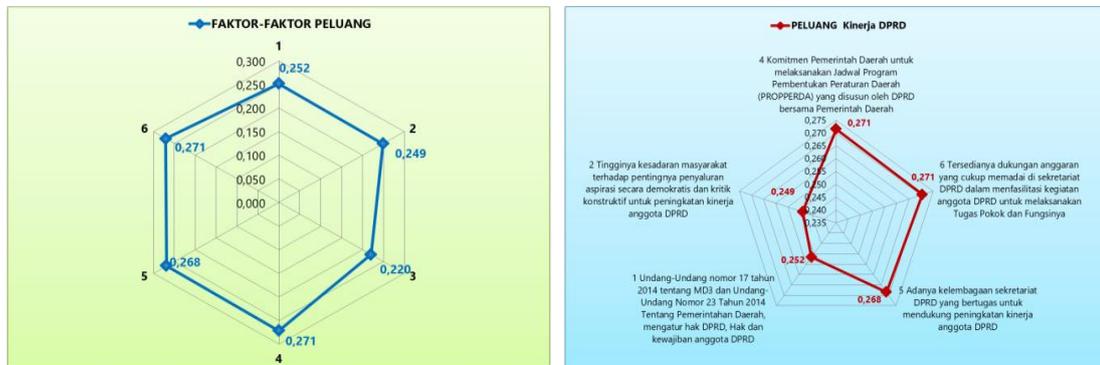


Sumber: diolah penulis, 2019

Berdasarkan pada Grafik 2, nilai *scoring* pada faktor kelemahan, kemudian terpilih 5 nilai *scoring* tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Lemahnya kemampuan anggota DPRD pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda; 2) Masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif; 3) Kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda rapat-rapat DPRD; 4) Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; dan 5) Masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD.

Grafik 3.

Nilai Scoring Berdasarkan Faktor-Faktor Peluang Dimiliki DPRD

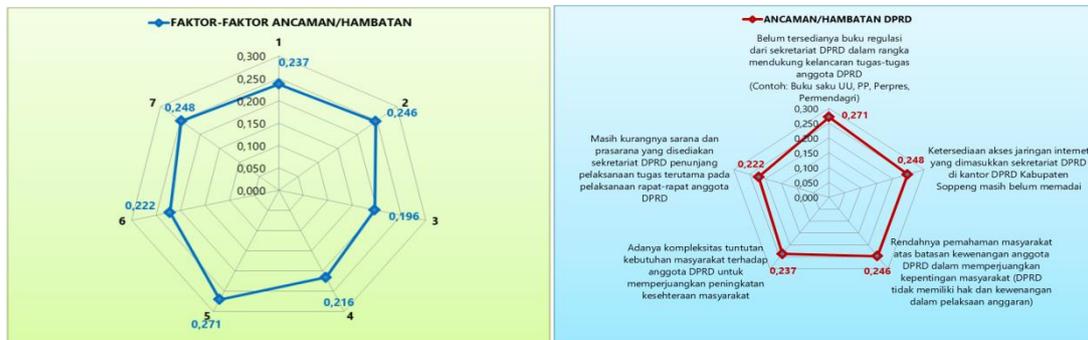


Sumber: diolah penulis, 2019

Berdasarkan pada Grafik 3, nilai *scoring* pada faktor peluang, kemudian terpilih 5 nilai *scoring* tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah; 2) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai di sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya; 3) Adanya kelembagaan sekretariat DPRD yang bertugas untuk mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD; 4) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hak DPRD, Hak dan kewajiban anggota DPRD; dan 5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dan kritik konstruktif untuk peningkatan kinerja anggota DPRD.

Grafik 4.

Nilai *Scoring* Berdasarkan Faktor-Faktor Ancaman/Hambatan Dimiliki DPRD



Sumber: diolah penulis, 2019

Berdasarkan pada Grafik 4, nilai *scoring* pada faktor ancaman/hambatan, kemudian terpilih 5 nilai *scoring* tertinggi yang kemudian akan digunakan dalam perumusan strategi dalam matriks SWOT untuk peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu; 1) Belum tersedianya buku regulasi dari sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPRD (Contoh: buku saku UU, PP, Perpres, Permendagri); 2) Ketersediaan akses jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih belum memadai; 3) Rendahnya pemahaman masyarakat atas batasan kewenangan anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat (DPRD tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran); 4) Adanya kompleksitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan sekretariat DPRD penunjang pelaksanaan tugas terutama pada pelaksanaan rapat-rapat anggota DPRD.

**Strategi Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng**

Penyusunan strategi peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Soppeng dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan dari faktor-faktor kunci kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*) secara internal dan pada faktor-faktor kunci peluang (*opportunity*) dan ancamannya (*threats*) dalam lingkungan yang dihadapi secara eksternal. Kemudian digunakan matriks SWOT

sebagai alat pencocokan (*matching tool*) dalam menyusun strategi yang efektif untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2009).

Adapun kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*) secara internal dan pada faktor-faktor kunci peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1) *Strenght* (S)

- a) Setiap anggota DPRD memiliki hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, sebagai upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.
- b) Setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan usulan dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses penjarangan aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c) Setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda inisiatif yang berpihak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- d) DPRD memiliki komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan SKPD, instansi terkait, anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan aspirasi dari masyarakat.
- e) Setiap anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administrasi (baik hak penganggaran untuk fasilitas penunjang kinerja anggota DPRD maupun hak kepemilikan dokumen-dokumen dalam menunjang kinerja anggota DPRD).

2) *Weaknesess* (W)

- a) Lemahnya kemampuan anggota DPRD pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda.
- b) Masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif.
- c) Kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda

rapat-rapat DPRD.

- d) Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.
- e) Masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD.

3) *Opportunities* (O)

- a) Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- b) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai di sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- c) Adanya kelembagaan sekretariat DPRD yang bertugas untuk mendukung peningkatan kinerja anggota DPRD.
- d) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hak DPRD, Hak dan kewajiban anggota DPRD.
- e) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dan kritik konstruktif untuk peningkatan kinerja anggota DPRD.

4) *Threats* (T)

- a) Belum tersedianya buku regulasi dari sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPRD (contoh: buku saku UU, PP, Perpres, Permendagri).
- b) Ketersediaan akses jaringan internet yang dimasukkan sekretariat DPRD di kantor DPRD Kabupaten Soppeng masih belum memadai.
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat atas batasan kewenangan anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat (DPRD tidak

memiliki hak dan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran).

- d) Adanya kompleksitas tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan sekretariat DPRD penunjang pelaksanaan tugas terutama pada pelaksanaan rapat-rapat anggota DPRD.

Setelah dijelaskan temuan dari hasil analisis SWOT kinerja anggota DPRD Kabupaten Soppeng, di bawah ini akan diuraikan strategi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng:

- a) Strategi (SO), yakni peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjangkaran aspirasi masyarakat, dan optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Strategi (WO), yakni pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome (hasil yang diharapkan) yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD.
- c) Strategi (ST), yakni peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD.
- d) Strategi (WT), yakni pengembangan metode penjangkaran aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya Perda inisiatif.

## KESIMPULAN

Upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD, meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja DPRD maka strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjangkaran aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan *outcome* (hasil yang diharapkan) yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjangkaran aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif. Maka dari itu, disarankan kepada anggota DPRD Kabupaten Soppeng melakukan melaporan kinerja secara kelembagaan juga mendorong setiap anggota DPRD melakukan laporan kinerja secara individu sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada konstituen.

## REFERENSI

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Gramedia pustaka utama.
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119-160.

- Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Banjarmasin. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 51-61.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kuat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. BPF, Yogyakarta.
- Rajab, A., & Undang-Undang, B. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. *RechtsVinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Rangkuti F D. (2005). *Strategic Management Concepts and Cases Ninth Edition*. New Jersey, Prentice Hall.
- Rizal, A., & Akbal, M. (2017). Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (Studi Pada DPRD Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, (2), 212-229.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundoko, A., Widayat, W., & Zulkifli, Z. (2016). Peran Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kota Magelang (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Suwanda, D. (2016). Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif. PT Remaja Rosdakarya.
- Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.
- Zakaria, A. (2019). Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Studi Gender dan Politik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- BPS Kabupaten Soppeng. (2018). *Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018*.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2016). *Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng*.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2017). *Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng*.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2018). *Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng*.

DPRD Kabupaten Soppeng. (2019). *Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. *Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.